

Implementasi kebijakan keolahragaan dan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet

Juniar Sirait¹, Khaerul Umam Noer^{1*}

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.

*Corresponding Author. Email: umam.noer@umj.ac.id

Abstrak

Keberhasilan dalam pencapaian peningkatan prestasi atlet tidak dapat dilepaskan dari kebijakan keolahragaan di suatu daerah. Tulisan ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan keolahragaan dan bagaimana peran para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan prestasi atlet di Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengamatan, wawancara dan diskusi kelompok terpusat, ditemukan bahwa implementasi kebijakan keolahragaan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan pemangku kepentingan lain belum berjalan secara optimal, antara lain terlihat dengan minimnya anggaran yang diberikan, kurangnya dukungan dari industri olahraga dalam peningkatan prestasi atlet, sehingga kegiatan keolahragaan belum berhasil secara signifikan terhadap peningkatan atlet-atlet berprestasi, untuk itu perlunya kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dalam peningkatan keolahragaan baik dari pendanaan ataupun sarana dan prasarana olahraga.

Kata kunci: kebijakan keolahragaan, prestasi atlet, kerjasama stakeholder, Tangerang Selatan

The implementation of sports policies and the role of stakeholders in improving athlete achievement

Abstract

The success in achieving athlete performance improvement cannot be separated from sports policies. This paper focuses on how the implementation of sports policies and how the role of stakeholders in efforts to improve athlete achievement in the City of Tangerang Selatan. By using qualitative research methods through observation, interviews and group discussion, it was found that the implementation of sports policies by the Department of Youth and Sports and other stakeholders was not running optimally, among others evident from the lack of budget provided, the lack of support from the sports industry in improving performance athletes, so that sporting activities have not been significantly successful in increasing the achievement of athletes, for this reason the need for cooperation with several parties involved in improving sports both from funding or sports facilities and infrastructure

Keywords: sport policy, athlete performance, stakeholders cooperation, Tangerang Selatan

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan segala aktivitas fisik yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial (Maksum 2016, Mutohir & Maksum 2017) Olahraga saat ini sudah menjadi ajang gengsi suatu bangsa atau daerah, di mana banyak menghabiskan biaya besar-besaran pada pesta olahraga. Untuk mencapai suatu keberhasilan begitu banyak permasalahan yang dihadapi. Adanya permasalahan olahraga dikarenakan munculnya kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah para atlet pelajar, yang tidak terpenuhi dan tidak adanya suatu aturan atau pedoman dalam melakukan kegiatan keolahragaan. Permasalahan ini harus segera diatasi dengan membuat suatu aturan atau pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan. Peranan pemerintah juga sangat diharapkan untuk

dapat menyelesaikan permasalahan keolahragaan di Kota Tangerang Selatan agar pembangunan di bidang keolahragaan bisa berjalan dengan optimal.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 5/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa pembangunan nasional di bidang keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, memperlakukan dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pada prinsipnya pengembangan olahraga berpijak pada tiga orientasi, yaitu olahraga sebagai rekreasi, olahraga sebagai kesehatan, dan olahraga untuk prestasi. Adapun beberapa masalah umum yang menjadi penyebab dalam peningkatan prestasi seorang atlet adalah kurangnya sarana olahraga, kurangnya prasarana olahraga untuk latihan, minimnya ketersediaan dana keolahragaan serta kurangnya peranan masyarakat yang terkait di bidang keolahragaan. Hal ini semua perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah ataupun peran dari pemangku kepentingan lainnya yang bergerak di bidang keolahragaan. Tanpa adanya dukungan tersebut mustahil pencapaian peningkatan prestasi atlet dalam olahraga berjalan dengan optimal. Ini adalah masalah yang sangat serius untuk segera dilaksanakan penanganan yang cepat dan tepat guna membantu proses kemajuan peningkatan atlet berprestasi. Kemajuan atlet akan terlihat dari seberapa maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh para pelatih.

Pembinaan dalam pelatihan keolahragaan adalah langkah awal dari sebuah keberhasilan dalam peningkatan prestasi atlet. Menurut Ortiz, Alfonso, & Luis (2015) sistem pembinaan tidak bisa diabaikan, bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dari suatu performa diperlukan adanya sistem pembinaan yang holistik dan integratif. Atas dasar itulah dibutuhkan sistem pembinaan olahraga nasional yang meliputi: sepuluh pilar kebijaksanaan, antara lain: (1) dukungan dana, (2) lembaga olahraga terdiri dari struktur dan isikebijaksanaan olahragaterpadu, (3) partisipasi, (4) pembinaan prestasi, (5) sistem penghargaan dan rasa aman, (6) fasilitas latihan, (7) pengadaan dan pengembangan pelatih, (8) kompetisi nasional, (9) riset, dan (10) lingkungan, media, dan sponsor (lihat Tripathi 2013, Mutohir & Maksum 2017, Nahnu 2018, Prasetyo, Damrah, & Marjohan 2018)

Keberhasilan atlet akan terlihat dalam suatu kejuaraan-kejuaraan baik ditingkat Nasional ataupun Internasional. Keberhasilan tersebut juga perlu didukung akan hadirnya sebuah kebijakan keolahragaan. Kebijakan keolahragaan dibuat untuk mengatur, mengarahkan melalui pembinaan dan pengembangan potensi atlet-atlet berprestasi di Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana kebijakan tersebut sudah ada dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Penelitian ini dimulai dari sebuah fenomena bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten mempunyai agenda rutin kejuaraan yang dilaksanakan oleh atlet-atlet pelajar dengan nama kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Pada kejuaraan tingkat pelajar ini, Kota Tangerang Selatan meraih peringkat Juara Umum selama 4 kali berturut turut dan mendapatkan predikat *Hattrick*. Namun lain halnya dengan kejuaraan tingkat umum dan profesional dalam kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi, Kota Tangerang Selatan belum mendapatkan predikat Juara Umum. Hal ini menjadi perhatian pemerintah atau pemangku kepentingan yang membidangi keolahragaan terhadap peningkatan atlet berprestasi di Kota Tangerang Selatan.

Hal ini menarik untuk dikaji, bahwa terdapat persoalan dalam pelaksanaan kebijakan keolahragaan di Tangerang Selatan, terutama bagaimana implementasi kebijakan dan keterkaitannya dengan peran seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet. Di sisi yang lain, penelitian ini krusial untuk dilakukan, sebab berbagai kajian mengenai implementasi kebijakan keolahragaan dan kaitannya dengan peran pemangku kepentingan dapat dikatakan sangat terbatas. Kajian yang dilakukan oleh Ma'mun (2016), Rahmat (2017), Sadi (2018), Mulyana (2019), Mikoshi (2020), Mardizal (2020) lebih fokus pada peran pemerintah dalam pengembangan olahraga. Kajian Harpy (2016), Yunida (2017), Nahnu (2018), Alim (2020), Shobih & Sudijandoko (2020), Pertiwi (2020), lebih fokus pada manajemen pelatih dan atlet. Kajian Wibowo (2017), Prasetyo, Damroh dan Marjohan (2018), Muhammad (2019) lebih fokus pada evaluasi kebijakan keolahragaan di daerah. Kajian lebih baru seperti Anwar & Dimiyati (2019), Adi & Soenyoto (2020), Guntoro, Kurdi, & Putra

(2020), Kurniawan (2020), Siregar (2020), Sinurat & Putra (2020) lebih berfokus pada upaya pengembangan prestasi atlet tanpa melihat bagaimana peran pemerintah dan para pemangku kebijakan olahraga lainnya. Tulisan ini berfokus tidak hanya pada kebijakan keolahragaan, namun juga bagaimana kebijakan keolahragaan, dipadukan dengan kerjasama para pemangku kepentingan, memiliki pengaruh pada peningkatan prestasi atlet. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran kompleksitas persoalan implementasi kebijakan keolahragaan dan keterkaitan antara pelaksanaan kebijakan dengan peran para pemangku kepentingan sehingga upaya peningkatan prestasi atlet dapat terlaksana dengan optimal.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI), atlet dan pelatih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengamatan, wawancara, dan diskusi kelompok terpusat. Pengamatan dilakukan dengan melihat langsung kondisi fasilitas olahraga dan sarana lain. Wawancara dilakukan pada dua puluh satu orang informan, mencakup kepala Dinas, kepala KONI, kepala FORMI, dua belas orang atlet dan enam orang pelatih dari beberapa cabang olahraga. Selain wawancara dan pengamatan, penelitian ini juga menggunakan berbagai dokumen kebijakan, dokumen kerja harian, dan dokumentasi gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan keolahragaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7/2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Permasalahan olahraga saat ini sudah menjadi kompleks dikarenakan banyaknya kebutuhan dalam para atlet dan pelatih. Era masa kini olahraga sudah menjadi ajang yang sangat bergengsi bagi dalam event-event kejuaraan. Banyak hal yang harus dilakukan dalam mencapai suatu keberhasilan. Dalam hal ini, para olahragawan sangat dituntut untuk lebih berpotensi dalam meningkatkan kemampuannya untuk bertanding. Kemampuan itu adalah suatu prestasi bagi para atlet. Prestasi datang tidak dengan sendirinya melainkan dengan segala perjuangan baik dari segi waktu, tenaga dan bahkan biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan latihan-latihan yang rutin. Dalam hal ini pemerintah melakukan upaya dalam menjalankan Rencana Strategis Kota Tangerang Selatan.

Peningkatan prestasi atlet ini harus didukung oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan industri olahraga. Karena tanpa adanya dukungan tersebut mustahil seorang atlet akan adapat mencapai prestasi yang diharapkan. Adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik oleh para pemangku kepentingan sungguh sangat diharapkan dalam meningkatkan prestasi atlet. Masalah-masalah yang terjadi terhadap atlet dan pelatih sudah merupakan tanggungjawab bagi Pemerintah dan para pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah Dispora, KONI, FORMI dan pihak-pihak lain yang ikut dalam bidang keolahragaan.

Dengan adanya kebijakan yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7/2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga di Kota Tangerang Selatan menjadikan kekuatan dalam pengembangan dan peningkatan prestasi atlet dalam olahraga. Demi mendorong suatu sistem yang baik perlu adanya dibuat aturan dalam keolahragaan. Aturan atau pedoman merupakan hal yang paling dasar dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa adanya aturan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan mustahil akan tercapai apa yang menjadi tujuan dari pemerintahan. Kebijakan keolahragaan akan terlihat berhasil apabila prestasi atlet meningkat secara optimal.

Sebelum pengiriman atlet dilaksanakan terlebih dahulu para atlet dilakukan pemusatan latihan, di mana para atlet diberikan pelatihan yang lebih fokus sehingga nanti diharapkan mampu mendapatkan prestasi yang gemilang. Pada saat pemusatan latihan para atlet pelajar diberikan dana pemusatan pelatihan selama beberapa hari. Dana tersebut adalah untuk menambah semangat atlet dalam bertanding. Kejuaraan ini diikuti oleh 20 cabang olahraga yang dipertandingkan. Selain dana pemusatan latihan ada juga dana /honor selama pertandingan diadakan dan terakhir uang pemberian penghargaan dan bonus bagi atlet berprestasi.

Keberhasilan atlet berprestasi tidak jauh dari beberapa sumber yang saling berkaitan yang dapat mempengaruhi akan peningkatan prestasi atlet. Sama halnya dengan Dispora, KONI juga melaksanakan event kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Dalam

hal ini KONI Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan pada tahun 2014 dan 2018, namun pada event tersebut Kota Tangerang Selatan belum berhasil mendapatkan peringkat Juara Umum. Jika di KONI para atlet dan pelatih mendapatkan uang pembinaan setiap bulan selama satu tahun sebelum pertandingan/kejuaraan dimulai. Pembinaan dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal terhadap para atlet pada saat pertandingan. Selain uang pembinaan para atlet juga diberi uang penghargaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi. Sama halnya pemangku kepentingan yang lain bahwa FORMI dan NPC juga mempunyai peranan dalam peningkatan atlet berprestasi, namun anggaran hibah yang diberikan belum menjangkau samapi kepada pembinaan atlet-atlet berprestasi. Anggaran yang ada hanya sebatas untuk kegiatan kesekretariatan dan sedikit pengadaan prasarana olahraga.

Untuk pencapaian suatu prestasi atlet perlu adanya sarana sebagai tempat para atlet dan pelatih melakukan rutinitas latihan agar kemampuan para atlet bisa berhasil dengan optimal. Dalam hal ini, Dinas Pemuda dan olahraga mempunyai tiga belas sarana olahraga yang sudah masuk dalam penarikan biaya dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, sedangkan sarana olahraga yang belum ada penarikan retribusi sebanyak enam sarana olahraga. Semua komponen ini akan sangat mendukung dalam keberhasilan peningkatan atlet berprestasi baik dari segi pendanaan maupun sarana dan prasarana olahraga.

Dari hasil penelitian ini perlu adanya sinergi pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan keolahragaan, oleh sebab itu ada enam variabel sebagai acuan adalah: (a) standar ukuran/tujuan dan sasaran kebijakan, (b) sumber daya, (c) karakteristik organisasi pelaksana, (d) sikap para pelaksana, (d) komunikasi antar organisasi pelaksana, dan (e) lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Untuk lebih jelas dan mendalam berikut uraiain dari beberapa variabel tersebut :

Standard kebijakan/ukuran dan tujuan

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana *kebijakan* tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana *kebijakan*. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *krusial*. Pelaksana kebijakan mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Sebelum membuat kebijakan terlebih dahulu tentunya sudah dilakukan pengkajian tentang kebutuhan dari sipelaku kebijakan, hal ini dilakukan guna menjawab semua kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan ataupun pelaksanaan yang mendukung program kerja pemerintah. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat pelaksana kebijakan, atau kelompok-kelompok pemerintah dan/atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kebijakan yang telah dibuat harus mempunyai capaian dalam suatu ukuran dan tujuan yang lebih jelas dan terarah, hal ini dilakukan agar kebijakan mencapai keberhasilan yang maksimal. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengatur, mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan keolahragaan yang dibuat sudah cukup jelas, di mana semua sudah terurai dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Tangerang Selatan, bertujuan untuk Pengembangan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan secara terarah, teratur, dinamis dan berjenjang, berkelanjutan sehingga mampu menciptakan atlet-atlet berprestasi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Internasional.

Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah aset dalam pengimplementasian kebijakan. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahapan dalam proses implementasi juga harus dapat dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Sumber daya

manusia harus memiliki kompetensi di bidangnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Jika kemampuan para pelaksana tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan maka keberhasilan suatu program dalam kebijakan tidak akan terpenuhi, apalagi jika kebijakan tersebut adanya unsur-unsur politik yang harus dijalankan tidak sesuai dengan kepentingan sipembuat kebijakan, maka kebijakan tersebut dianggap gagal. Seringkali kita mendengar bahwa terhambatnya suatu program ataupun kegiatan dikarenakan adanya kekurangan dalam penganggaran suatu pelaksanaan kegiatan, sehingga apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan tidak berhasil seperti yang sudah direncanakan. Hal ini sangat sering terjadi dan bisa berdampak negatif terhadap pengembangan dan pembinaan masyarakat terkait bidang keolahragaan.

Komponen sarana dan prasarana juga merupakan hal yang penting juga, di mana ini adalah merupakan satu kesatuan dalam mensukseskan kebijakan, tanpa adanya sarana dan prasarana mustahil kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Namun terkadang sarana dan prasarana juga tidak memenuhi persyaratan untuk kelayakan dalam penggunaannya. Hal ini juga merupakan masalah yang sangat krusial yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya Sarana dan prasarana menjadikan salah satu tolok ukur dari keberhasilan program perencanaan pemerintah dalam pelayanan prima ke masyarakat. Kaitan dengan hal tersebut Pemerintah harus konsentrasi dalam peningkatan perbaharuan sarana dan prasarana agar menunjang program dan kegiatan kebijakan keolahragaan khususnya. Dalam variabel sumber daya ini terdapat tiga indikator yang perlu dibahas diantaranya adalah :

Pertama, Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah penggerak dari keseluruhan kebijakan keolahragaan, tanpa adanya sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan mustahil kebijakan tersebut akan berjalan. Sumber daya yang handal akan sangat memengaruhi terhadap kinerja para pelaksana tersebut hal ini dapat terlihat dalam sebuah organisasi yang mana organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang akan menjalankan organisasi tersebut. Untuk itu sumber daya manusia mempunyai peranan sangat penting terhadap keberhasilan pengimplementasian kebijakan keolahragaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan adanya sumber daya manusia yang cukup handal dalam pengembangan dan pembinaan atlet-atlet berprestasi, di mana para pelatih dan atlet dapat bekerjasama untuk menjalankan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Para pelatih yang mempunyai sertifikasi yang cukup baik akan mampu menjadi ujung dari keberhasilan peningkatan prestasi atlet.

Kedua, ketersediaan dana. Masalah anggaran ini akan menjadi hal yang sangat krusial terlebih segala bentuk kegiatan harus diawali dengan adanya ketersediaan dana dalam suatu organisasi. Peranan dana ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembinaan peningkatan atlet-atlet berprestasi di Kota Tangerang Selatan. Anggaran sudah menjadi masalah yang umum yang sampai saat ini Pemerintah pusat ataupun daerah belum secara optimal dapat mengatasinya. Dalam menjalankan kebijakan perlu adanya dukungan atau peran dari pemangku kepentingan lainnya. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan keolahragaan cukup banyak, diawali dengan kegiatan pembibitan atlet lalu pembinaan, pengembangan sampai pada tahap akhir peningkatan prestasi atlet. Kesemuanya ini menjadi satu kesatuan untuk tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan yang akan berdampak pada peningkatan prestasi atlet. Dari hasil penelitian ini menunjukkan minimnya ketersediaan dana pengiriman event keolahragaan tingkat Provinsi baik tingkat pelajar maupun professional, dana pemusatan pelatihan, dana pembinaan atlet berprestasi dan dana pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi. Minimnya ketersediaan dana tersebut akan sangat berdampak terhadap peningkatan prestasi atlet. Selain itu minimnya anggaran dibeberapa pemangku kepentingan sehingga berdampak terhadap pemberian kepada atlet dan pelatih berprestasi. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah juga para pemangku kepentingan lainnya, bahwa peranan dana akan sangat berdampak terhadap peningkatan atlet di Kota Tangerang Selatan.

Ketiga, sumber daya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal yang sangat konflik karena sarana dan prasarana sangat membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus terencana dari semua aspek dalam mendukung implementasi kebijakan. Sumber daya Sarana dan prasarana ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan keolahragaan. Sumber daya sarana dan prasarana akan membuktikan dari tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Di mana kebijakan tersebut harus dapat memfasilitasi seluruh aspek yang berkaitan dalam peningkatan pengembangan dan pembinaan para atlet-atlet yang ada di Kota Tangerang Selatan. Sumber daya sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat diperhatikan mengingat banyaknya cabang olahraga yang membutuhkan

untuk tempat latihan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator sarana dan prasarana di Kota Tangerang Selatan masih dikatakan sangat minim sekali. Dari Sembilan belas sarana olahraga hanya tiga belas sarana olahraga yang bisa dipergunakan dan sudah terdaftar dalam penarikan retribusi. Sarana olahraga yang sangat minim sekali dan banyaknya atlet yang mandiri dengan menggunakan sarana olahraga pihak swasta dengan sistem bayar iuran bulanan. Club-club cabang olahraga juga mempunyai peranan terhadap peningkatan para atlet berprestasi. Banyaknya club-club olahraga yang mempunyai sarana olahraga juga sangat membantu dalam peningkatan atlet berprestasi.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumberdaya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. Tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi sangat diperlukan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Oleh sebab itu perlu adanya kecocokan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dijalankan.

Organisasi sebagai pengurus cabang olahraga sangat dibutuhkan karena dengan adanya kepengurusan maka dalam pencapaian akan pelaksanaan program maupun kegiatan akan sesuai dengan output yang diharapkan. Oleh karena itu keharmonisan suatu kepengurusan dalam cabang olahraga juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas terhadap peningkatan atlet berprestasi. Dari hasil penelitian variabel ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana ini cukup baik, di mana keterlibatan antara organisasi formal dan informal yang saling bersinergi dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan atlet berprestasi.

Sikap atau Disposisi Para Pelaksana

Kebijakan publik dapat terlaksana apabila arah dan tujuannya sudah jelas, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Para individu harus dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini sikap para pelaksana harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada atasan ataupun kepada sesama pelaksana. Penyampaian komunikasi harus jelas dan terurai dalam penjabarannya, karena apabila sipelaksana menyalahartikan penerimaan informasi maka akan mengalami gangguan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sikap pelaksana harus mampu menunjukkan kemauannya dalam melaksanakan suatu instruksi atau perintah dari atasan, karena jika sikap pelaksana menunjukkan penolakan dari para pelaksana maka hal ini akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Ada beberapa informasi yang dapat diterima oleh para pelaksana diantaranya secara verbal ataupun secara tulisan. Jika secara verbal mungkin masih bisa mengurangi kesalahpahaman dalam mengimplementasikan kebijakan, tetapi jika komunikasi tersebut secara disposisi yang berupa tulisan singkat maka penjabaran ini bisa disalahartikan. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus benar-benar memahami dan menguasai apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi. Implementasi Kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dari uraian di atas diharapkan para pemangku kepentingan mampu menjadi jembatan kepada seluruh pelatih ataupun atlet agar apa yang menjadi masalah-masalah mereka dilapangan akan dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu perlunya suatu arahan atau instruksi yang baik sangatlah dibutuhkan. Dalam suatu organisasi hubungan antara pelatih dan atlet ibarat hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan dan komunikasi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Komunikasi yang terjalin juga harus cukup terarah agar apa yang dituju akan tercapai.

Dari hasil penelitian pada variabel ini ditemukan adanya salah satu pemangku kepentingan, yakni Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, yang tidak beroperasi. Padahal pemangku kepentingan tersebut adalah induk dari para atlet pelajar. Ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam menjalankan organisasi tersebut dikarenakan Ketua Umumnya yang selalu berganti-ganti sebelum masa jabatannya selesai, hal ini akan sangat terlihat terhadap ketidakmampuan para

pelaksana dalam menjalankan kebijakan keolahragaan dan akan sangat berdampak negatif terhadap peningkatan para atlet- atlet berprestasi.

Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan atau ide dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini dikarenakan komunikasi sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa saja terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan adalah bukan kebutuhan dari masyarakat setempat yang mengenal betul akan permasalahan yang mereka hadapi, akan tetapi kebijakan public tersebut biasanya bersifat dari atas kebawah sehingga memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui atau bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Pentingnya suatu komunikasi dalam organisasi guna mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan dapat dilaksanakan. Seringnya kegagalan implementasi kebijakan dikarenakan kepentingan-kepentingan para pimpinan, sehingga berdampak terhadap pola pikir dan pandangan para pelaksana terhadap implementasi kebijakan.

Disamping itu, kemampuan dan kemauan para pelaksana juga harus dipertanyakan, apakah para pelaksana sudah mengetahui betul dan paham akan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan dan ketiga Intensitas terhadap kebijakan. Dari elemen tersebut merupakan satu kesatuan dari serangkaian keberhasilan implementasi kebijakan. Pengetahuan pelaksana akan isi dari kebijakan sangat menentukan hasil dari kebijakan, pemahaman dan pendalaman isi dari kebijakan juga sangat memegang peranan yang penting agar pada saat pelaksanaannya kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Minat atau Intensitas para pelaksana juga sangat diperlukan.

Hubungan yang baik akan terlihat dari keberhasilan komunikasi yang dijalin apakah komunikasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Peranan stakeholder dalam komunikasi terhadap apa yang menjadi permasalahan di para atlet adalah sangat dibutuhkan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik pula. Dari hasil penelitian pada variabel ini menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan cukup optimal hal ini terlihat dari kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk peningkatan para atlet berprestasi. Saling melengkapi kekeurangan sesama organisasi di bidang keolahragaan juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan atlet berprestasi.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal dapat berperan aktif dalam keberhasilan kebijakan keolahragaan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik akan sangat mempengaruhi terhadap kegagalan para atlet dalam peningkatan prestasi, di mana pada zaman ini banyaknya pengaruh –pengaruh buruk dari media sosial yang sangat dominan. Oleh sebab itu perlu adanya peran pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan yang ada agar tidak terjadinya hambatan dalam melaksanakan tujuan.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, hal ini terlihat dari keberhasilan tingkat ekonomi yang cukup tinggi di Kota Tangerang Selatan dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang besar, juga banyaknya penggalangan bidang keolahragaan yang dilaksanakan senam setiap hari Jumat di kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan berbagai komunitas senam tradisional dan rekreasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan permasalahan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan prestasi atlet tidak bisa dilepaskan dari adanya sinergi dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, FORMI, atlet, vendor, dan pelatih. Dari beberapa variable, terdapat dua variabel yang sangat mempengaruhi terhadap peningkatan atlet berprestasi yaitu *Pertama*, sumber daya, di mana ada sumber daya keuangan/pendanaan dan sumber daya sarana dan prasarana yang masih dalam masalah yang belum terselesaikan. Pendanaan yang sangat minim sekali terhadap uang pembinaan, uang bonus dan juga uang jasa atlet pada saat event-event kejuaraan tingkat Provinsi. Pendanaan yang sangat minim akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi atlet. Selain itu, sumber daya sarana dan prasarana juga masih dalam kondisi yang minim sekali dikarenakan banyaknya sarana olahraga yang belum layak atau ukuran yang belum standard, selain itu para atlet dan pelatih masih mempergunakan sarana olahraga dari pihak swasta dengan cara penyewaan dengan membayar sistem bayar bulanan melalui club-club olahraga. *Kedua*, sikap para pelaksana, di mana variabel ini diketahui adanya stakeholder yang tidak berperan aktif dikarenakan organisasi tersebut tidak beroperasi. Hal ini disebabkan karena para pelaksana tidak melakukan kebijakan keolahragaan di mana para pelaksana tidak mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Ketidakterperannya organisasi ini dikarenakan ketidakmampuan dan pemahaman yang kurang akan menjalankan suatu organisasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi atlet. Kedua variabel ini saling berkaitan dalam menjalankan perannya di bidang keolahragaan, dimulai dari pendanaan, pembinaan sehingga tercetaklah atlet-atlet berprestasi di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil uraian kesimpulan dari penelitian di lapangan mengenai sinergi pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet di Tangerang Selatan, ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan, yaitu: *Pertama*, membuat strategi Memorandum Of Understanding (MOU) dalam rangka peningkatan prestasi olahraga kepada semua pihak yang terkait dalam bidang keolahragaan contohnya; kerjasama dengan pihak –pihak sekolah swasta yang mempunyai banyak sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung pada saat adanya event-event kejuaraan bergengsi baik tingkat Nasional ataupun Internasional. *Kedua*, sinergi pemangku kepentingan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan dimulai dari beberapa sumber, pertama meningkatkan sumber daya pendanaan keolahragaan mulai dari uang pembinaan kepada atlet dan pelatih, uang pemberian penghargaan (bonus) tingkat Provinsi dan juga uang untuk jasa atlet selama bertanding dalam suatu event kejuaraan, hal ini dikarenakan adanya uang penghargaan yang lebih besar dari kota/kabupaten yang lain sementara uang penghargaan tersebut selisih jauh dari yang didapat oleh atlet Kota Tangerang Selatan. Kedua meningkatkan sumber daya sarana dan prasarana juga sangat berperan terhadap peningkatan prestasi atlet, untuk itu disarankan kepada Pemerintah Tangerang Selatan untuk membuat sarana olahraga yang memadai, yang sesuai standard Nasional, hal ini dikarenakan sarana olahraga di wilayah lain seperti Kabupaten Tangerang yang sudah mempunyai gedung olahraga yang cukup luas dan standard Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S., & Soenyoto. (2020). Sport Specific Class Analysis And Urgency. *Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan*, 3(2)
- Alim, A. (2020). Studi manajemen pelatih dan atlet pada pembinaan prestasi cabang olahraga tenis lapangan. *Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi)*, 16(1)
- Anwar, K., & Dimiyati. (2019). The psychological skill characteristics of Indonesian volleyball players reviewed based on gender and position. *Jurnal Sportif: Jurnal Penelitian dan Pembelajaran*, 5(2)
- Guntoro, T.S., Kurdi, & Putra, MFP. (2020). Karakter kepribadian atlet Papua: kajian menuju POPNAS ke-XV. *Jurnal Sportif: Jurnal Penelitian dan Pembelajaran*, 6(1)

- Harpyn, S. (2016). *Analisis Pembinaan Manajemen Olahraga Prestasi KONI Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Negeri Makassar
- Kurniawan, DD. (2020). Pengaruh Latihan Metode Drill dan Game Terhadap Peningkatan Prestasi Lompat Jauh Pada Atlet Remaja. *Sport Science and Health*, 2(5)
- Makmun, A. (2016). Pembudayaan Olahraga dalam Perspektif Pembangunan Nasional di Bidang Keolahragaan. *Humanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 9(1)
- Mardizal, J. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Mutu Sekolah Atlet Ragunan DKI Jakarta. *Journal of Civil Engineering and Vocational Education*, 7(1)
- Mikoshi, M.S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris KONI Se-Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1)
- Muhammad, HN. (2019). Evaluasi Konteks Program Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Hockey di Jawa Timur. *Journal of Sport Science and Education*, 4(2)
- Mulyana, N. (2018). Peran Disporapar Kabupaten Kuningan Dalam Meningkatkan Olahraga Prestasi Di Kabupaten Kuningan. *JuARA : Jurnal Olahraga*, 3(1)
- Mutohir, T.H., & Maksum, A. (2017). *Sport Development Indeks*. Jakarta: Indeks
- Nahnu, P.L. (2018). *Manajemen Olahraga Pariwisata dan Rekreasi oleh Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Ortiz, I., Alfonso, J. C. R., & Luis, J. C. M. (2015). Sport Management, Leadership in The Organization. *Journal of Physical Education and Sports Management*, 2(2)
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Pertiwi, S.M., (2020) *Dampak Social Agent Terhadap Prestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Prasetyo, D.E., Damrah, & Marjohan. (2018). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, 1(2)
- Rahmat, M. (2017). *Peran pemerintah Kota Medan dalam Pembangunan Pemuda di Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sadi. (2018). Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Olahraga Pariwisata untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu keolahragaan*, 1(1)
- Shobih, M., & Sudijandoko, A. (2020). Evaluasi Program Latihan Atlet Bola Voli Putra Kabupaten Lamongan Dalam Persiapan Porprov 2019. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 8(1)
- Sinurat, R., & Putra, MA. (2020). Perspektif olahraga tinju dalam mendukung prestasi olahraga Kabupaten Rokan Hulu. *Penjakesrek*, 7(1)
- Siregar, AEY. (2020). *Analisis Prestasi Atlet Di Perguruan Kei Shin Kan Karete-Do Sumatera Utara*. Medan: Universitas Negeri Medan

Tripathi, R. (2013). Sport management : An emerging field. *International Journal of Multidisciplinary Research in Social and Management Sciences*, 1(1)

Undang- Undang Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Yunida, E. (2017). Manajemen Pembinaan Merdeka Basketball Club (MBBC) Pontianak kalimantan Barat tahun 2016. *Journal of Physical Education and Sports*, 125-132.

Wibowo, K. (2017). *Evaluasi Pembinaan Prestasi Olahraga Bola Basket di Kabupaten Magetan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret